

**ANALISIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP  
TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS INFORMASI DALAM  
WEBSITE PEMDA  
(Studi Empiris pada Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2015)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Oleh:

**RESPATHY BUDHY WIBOWO**  
**B 200 120 080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP  
TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS INFORMASI DALAM  
WEBSITE PEMDA**

**(Studi Empiris pada Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2015)**

oleh:

**RESPATHY BUDHY WIBOWO**  
**B 200 120 080**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,



**Drs. Wahyono. MA., Akt.**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS INFORMASI DALAM WEBSITE PEMDA

(Studi Empiris pada Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2015)

Disusun oleh:

**RESPATHY BUDHY WIBOWO**  
**B 200 120 080**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 14 Desember 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Dewan penguji:

1. Eny Kusumawati AK., SE., M.M. (.....f.)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Rina Trisnawati, Dra, Ak, M.SI, Ph.D (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Yuli Tri Cahyono SE., M.M., AK. (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

  
  
**Dr. Syamsudin, M.M.**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Januari 2017

Penulis



**RESPATHY BUDHY WIBOWO**

**B200120080**

**ANALISIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP  
TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS INFORMASI DALAM  
WEBSITE PEMDA  
(Studi Empiris pada Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2015)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, belanja daerah terhadap kualitas informasi website pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini laporan anggaran dan tingkat informasi yang diberikan pada kabupaten maupun kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat yang dijadikan sampel penelitian yang terdiri laporan realisasi APBD 35 kabupaten/ kota di provinsi Banten dan Jawa Barat tahun 2015 dan data statistik dan pengungkapan sukarela dan informasi yang relevan, Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil data penelitian pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan ukuran pemda berpengaruh terhadap kualitas informasi website pemerintah daerah sedangkan kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi website pemerintah daerah.

Kata Kunci : PAD (Pendapatan Asli Daerah) ; UP (Ukuran Pemda) ; KP (Kompleksitas pemerintahan) ; BD(belanja daerah); Kualitas Website Pemda

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the influence of local revenue (pad), size of local government, complexity of local government, regional expenditure on the quality of information local government website. The population in this study reports the budget and the level of information provided to the districts and cities in Banten and West Java Provinces which are used as research samples consisting of realization reports of 35 districts / municipalities in Banten and West Java provinces in 2015 and statistical data and voluntary disclosure and information which is relevant, This research method using multiple linear regression analysis. The results of research data on local revenue, regional expenditure, and size of local government influence on the quality of information local government website while the complexity of government does not affect the quality of information local government website.

Keywords: Local Own Revenue (PAD); UP (Local Government Size); KP (Complexity of government); BD (regional expenditure); Quality of Local Government Website

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah iklim pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemda menyusun laporan keuangan, BPK mengaudit dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan Pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya.(Puspita,2012)

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan laporan keuangan yang diberikan melalui laporan tahunan (*annual report*). Agar pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*). Soemarso (2003) terdapat dua kategori pengungkapan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders*. Pertama, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah semua informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kategori yang kedua yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yang berarti pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh suatu entitas tanpa diharuskan peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Penelitian terkait dengan pengungkapan laporan keuangan belum banyak dilakukan pada laporan keuangan pemerintahan dibandingkan

perusahaan, disebabkan karena terbatasnya informasi pemerintah yang dapat diakses publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari pengungkapan. Penelitian ini menggunakan pengungkapan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat *mandatory* sehingga lebih mengukur ketaatan dibandingkan dengan pengungkapan (Hilmi, 2011).

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di hampir semua organisasi dikarenakan biaya yang relatif murah ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional (Bonson dan Escobar, 2005 dalam Puspita dan Martani, 2012). Ini merupakan salah satu isyarat bahwa pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan e-Government. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, murah, dan mudah. Salah satunya adalah melalui website. Website pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik Pemda yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.(Puspita,2012)

Berbagai informasi disajikan dalam website pemda ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah, tidak banyak juga yang memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Peran pemerintah dalam penyedia layanan publik serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi sangat besar akibat adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya sistem pengawas, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian kemajuan pemda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah yang memiliki website resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam website pemda.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan antara dua variabel memiliki hubungan atau tidak. Penelitian ini lebih dahulu beranjak pada gagasan yang ingin diteliti oleh peneliti, kemudian diperkuat dengan teori dan kemudian dikembangkan dengan berbagai masalah yang diajukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan dukungan empiris di lapangan. Penelitian ini menggunakan bentuk kuantitatif dikarenakan ingin menjelaskan Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam *Website Pemda*

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Penggunaan teknik observasi secara langsung memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai website serta pengungkapannya secara detail



dan peneliti hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Data yang didapat melalui situs / *website* resmi pemerintah Kabupaten atau Kota Provinsi Banten dan Jawa Barat melalui internet

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. (Sugiyono, 2009: 207-208).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan dalam mengidentifikasi hubungan antar variabel yang satu dengan yang lain linier atau tidak dalam model persamaan regresi, Dalam pengujian ini menggunakan 2 model pengujian yang dilakukan yaitu dengan menganalisis dalam *Variance Inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,612	1,634	Tidak terjadi Multikolinieritas
Ukuran Pemda	0,322	3,103	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kompleksitas Pemerintah	0,165	6,075	Tidak terjadi Multikolinieritas
Belanja Pemerintah	0,121	8,258	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa dengan metode *tolerance* dan VIF pada variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintah dan belanja pemerintah terdapat nilai *tolerance* kurang dari 1 dan VIF kurang dari 10 maka dari keempat variabel yang diteliti dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang digunakan dalam mengidentifikasi korelasi yang terjadi pada data yang digunakan dalam sampel dengan melihat *times series*. Metode pengujian ini menggunakan metode *durbin Watson* (D-W). Hasil analisis yang diperoleh adalah:

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Kriteria	Keterangan
1,545	1,5 – 2,5	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Data Olahan 2015

Hasil analisis Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dengan metode *Durbin-Watson* adalah 1,545. Nilai tersebut terletak 1,5 - 2,5 maka data yang diteliti tidak terjadi autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan dengan mengidentifikasi penyimpangan dalam perbedaan varian residual yang dilakukan pada semua observasi pada model regresi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *glejser*. Hasil analisis yang didapat adalah:

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t hitung	t Sig	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	-0,493	0,625	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Ukuran Pemda	-0,241	0,811	Tidak terjadi

			Heteroskedastisitas
Kompleksitas Pemerintahan	-0,854	0,400	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Belanja Pemerintah	0,536	0,596	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

---

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan hasil Tabel 3 diatas menunjukkan nilai t sig pada variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan dan belanja pemerintah lebih besar daripada 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya antara variabel independen terhadap dependen. Penelitian ini untuk menjelaskan Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah Terhadap kualitas informasi pada *website*.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1 Simpulan

Hasil analisis yang dijelaskan pada bab IV secara detail dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyataan hipotesis I yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi *website* terbukti benar yang dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang juga menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi *website* dengan nilai t sig. 0,047 lebih kecil daripada 0,05.

Penyataan hipotesis II yang menyatakan ukuran pemda berpengaruh terhadap kualitas informasi *website* tidak terbukti benar yang dibuktikan dengan hasil penelitian ini menyatakan ukuran pemda tidak

signifikan terhadap kualitas informasi *website* dengan nilai  $t$  sig. 0,187 lebih besar daripada 0,05.

Penyataan hipotesis III yang menyatakan kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi *website* tidak terbukti benar yang dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang juga menyatakan kompleksitas pemerintahan tidak signifikan terhadap kualitas informasi *website* dengan nilai  $t$  sig. 0,619 lebih besar daripada 0,05.

Penyataan hipotesis IV yang menyatakan belanja pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi *website* tidak terbukti benar yang dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan belanja pemerintah tidak signifikan terhadap kualitas informasi *website* dengan nilai  $t$  sig. 0,622 lebih besar daripada 0,05.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan pada kesimpulan maka ada saran yang perlu diberikan:

Diharapkan pihak yang bersangkutan seperti pemerintah provinsi banten memperhatikan pendapatan asli daerah (PAD) karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas informasi *website*. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan pendapatan yang berasal dari daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah akan membuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil dan menunjukkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah terdorong untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas di dalam *website* agar masyarakat lebih percaya dengan pemerintah daerah bahwa pajak dan retribusi yang dihasilkan dari masyarakat makan benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 3, 1-11
- Amalia Aun Sauma. 2014. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa, Sumatra dan Kalimantan Tahun Anggaran 2011”* Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hafidh Susila Sudarsana. 2013. *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di indonesia)”* Skripsi 2013, Universitas Diponegoro
- Hilmi, Amiruddin Zul. 2011, “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi” Simposium Nasional Akuntansi 2012, Universitas Indonesia
- Lesmana, Sigit I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Thesis. Surakarta : FE UNS
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi II*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. FE UI. Depok.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No. Th. 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemda Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
- Ratmono, Dwi. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet : Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. Media Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No. 2, September 2013: 2238-1205

- Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar, 2015, Analisis Faktor factor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Skripsi Sarjana UMY: Jogja
- Rora puspita dan dwi maryani.2012. *“analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi website pemda)* Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. Puspita,
- Rora. . 2010. *Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs Pemda Tahun 2010*. Skripsi Sarjana. FEUI: Depok
- Syafitri, Febriani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Skripsi, Universitas indonesia, Depok.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*
- Xiao, J. Z., Yang, H., & Chouw, C. W. 2004. The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese Companies. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol 23, 191-225.
- Zulfikar . 2013, “Pengaruh Karakteristik PEMDA berupa ukuran PEMDA, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, dan belanja daerah serta temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada Anggaran 2007” Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.